EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GAYO LUES

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZARRAH
NIM. 150802003
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1440 H

EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GAYO LUES

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

ZARRAH
NIM. 150802003

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mahmuddin, M. Si	Zakki Fuad Khalil, S.IP,. M. Si.
NIP. 197210201997031002	NIDN. 2019119001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus serta diterima sebagai salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

ZARRAH
NIM. 150802003

Pada Hari/Tanggal
Selasa 6 Januari 2020 M

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Mahmuddin, M.Si.	**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**
NIP. 197210201997031002	**NIDN. 2019119001**
Penguji I,	**Penguji II,**
Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si	**Cut Zamharira, S.IP., M.AP**
NIDN. 2002079001	**NIDN. 2017117904**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry

Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M.Hum
NIP.197307232000032002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ZARRAH
NIM	: 150802003
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2020
Yang Menyatakan,

Zarrah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues**". Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia dari lembah kebodohan atau kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu Adminitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini. Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan perlu adanya kritik, masukan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dikemudian hari. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta, sungguh ananda tidak akan dapat membalas semua jasa selama ini. Lantunan doa semoga sedikit banyak bisa menjadi tanda bakti hamba kepada keduanya. Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Eka Januar selaku Ketua Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr Mahmuddin, M.Si. selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulis.
6. Terimakasih kepada seluruh dosen FISIP yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
7. Terimakasih kepada seluruh staf akademik yang telah membantu penulis dalam pembuatan surat dan segala keperluan agar skripsi dapat diselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar S.AP, yang telah menyemangati penulis selama ini.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yaitu Ratna Dewi, Dahliya, lenang, mardaini, Elvi Susanti, Lisma Dewi, Intan Rusadi dan lain-lain yang selalu mendukung saya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan bagi penulis sendiri. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. Wallahua'lam bi al-shawab.

Banda Aceh 6 Januari 2020
Penulis,

Zarrah

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Penelitian Terdahulu 5

BAB II KAJIAN TEORITIS **9**
2.1 Konsep Evaluasi 9
2.2 Konsep Pemekaran Wilayah 10
2.3 Konsep Kesejahteraan Masyarakat 16
2.4 Kerangka Pemikiran 25

BAB III METODE PENELITIAN **27**
3.1 Jenis Penelitian 27
3.2 Lokasi Penelitian 27
3.3 Jenis dan Sumber Data 27
3.4 Teknik Pengumpulan Data 28
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **33**
4.1 Profil Kabupaten Gayo Lues 33
4.2 Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues 38
4.3 Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues 55

BAB V PENUTUP **64**
5.1 Kesimpulan 64
5.2 Saran 65

DAFTAR PUSTAKA **66**
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 IDeAS : Data Persentase dan Peringkat Kabuapten/kota termiskin di Aceh 3

Tabel 4.1 Rasio Guru-Murid Kabupaten Gayo Lues 42

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Provinsi Aceh 2018 46

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Gayo Lues ... 47

Tabel 4.4 Persentase Kemiskinan Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh 2018 51

Tabel 4.5 Luas Lahan Sawah, Kebun dan Ladang Gayo Lues 60

Tabel 4.6 Objek Wisata Di Kabupaten Gayo Lues 2016-2018 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran..... 26

Grafik 4.1 PAD Kabupaten Gayo Lues 2014-2018 50

Grafik 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan (persen) di Kabupaten Gayo Lues..... 58

Grafik 4.3 Tingkat kemiskinan Kabupaten Gayo Lues..... 59

ABSTRAK

Pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan perekonomian guna kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, akan tetapi terjadi di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk pemekaran di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues dan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, pertama segi pelayanan publik, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan berupa pelayanan administrasi, pendidikan dan kesehatan dan juga pelayanan berupa barang dan jasa seperti akses jaringan internet, jaringan telepon, dan listrik mulai memasuki desa-desa di Kabupaten Gayo Lues. Kedua segi pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat belum merata, masih ada daerah yang tergolong desa tertingga dan juga tingginya angka kemiskinan. Ketiga segi potensi alam, masyarakat dapat mengelola sendiri sumberdaya alam yang melimpah di Gayo Lues karena mendapatkan pengakuan menjadi daerah otonom. Dalam hal ini pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi pelayanan publik kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pembangunan perekonomian, serta pengelolaan potensi alam dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Evaluasi, Pemekaran Wilayah, Kesejahteraan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang begitu banyak sehingga sering menghadapi permasalahan yang begitu rumit salah satunya yaitu terlambatnya percepatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan non infrastruktur seperti sumber daya manusia di berbagai sektor sehingga dapat menimbulkan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, karena berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, namun hingga saat ini faktanya masih begitu banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk Aceh sehingga Pemerintah harus memiliki strategi yang khusus untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Aceh diantaranya yaitu dengan Pemekaran Wilayah.

Pemekaran Wilayah merupakan sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan dari Otonomi Daerah.

Pemekaran Wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat

sesuai dengan harapan serta tujuan dari pemekaran tersebut. Melihat dari sisi positifnya pemekaran daerah mampu untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Dengan Pemekaran ini Daerah mempunyai peluang yang begitu besar untuk lebih diperhatikan dan keluar dari keterbelakangan maupun ketertinggalan.[1]

Program ini merupakan salah satu Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menerapkan adanya peranan masyarakat lokal dalam mengelola berbagai potensi untuk pembangunan di daerahnya masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan majunya suatu daerah di berbagai sektor yang ada di daerah daerah tersebut.[2]

Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di tingkat Provinsi, akan tetapi terjadi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk pemekaran di Provinsi Aceh salah satunya pemekaran ditingkat Kabupaten yang ada di Aceh yaitu Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo Lues merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan dasar hukum Undang-Undamg Nomor 4 tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pengunungan Bukit sehingga dijuluki negeri seribu bukit[3].

---

[1] Ermaya Suradinata, *pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka untuk meningkatkan interrasi bangsa*, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan, 2000), hal 10.

[2] Abdul Hakim, *analisis dampak Pemekaran daerah ditinjau dari aspek Percepatan pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan public,* (pekan baru Fakultas of Ekonomic Riau University,JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 Februari 2017)

[3] Sella Ayu Wandira Harahap,*"Dampak Pemekaran Desa dalam Pembangunan Infrastuktur* (Studi Kasus Pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)", Vol 7 No 1 April 2014 ISSN : 2085 – 0328 hal 293

Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang tergolong muda. Di usianya yang kini menginjak 16 tahun, kendala pembangunan baik secara fisik maupun non fisik menjadi hambatan yang sering dialami oleh kabupaten ini, Gayo Lues juga yang menduduki Kabupaten termiskin pada tahun 2015.

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Gayo Lues, "Jumlah penduduk miskin tahun 2017 berjumlah, 19,910 jiwa (21,97 %) dari proyeksi total jumlah penduduk Gayo Lues 91,024 jiwa. Dari data yang kami catat pada tahun 2016 lalu, angka kemiskinan sebanyak 19,480 jiwa atau 21,86 % dari jumlah penduduk 89,500 jiwa. Sementara pada tahun 2017 angka kemiskinan sebanyak 19,910 atau 21,97 % dari jumlah penduduk 91,024 jiwa".[4] Bahkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 juga meningkat angka kemiskinan di Gayo Lues bisa kita lihat dari tabel BPS dibawa ini Gayo Lues termasuk daerah Termiskin dari persentasi penduduk.

Tabel 1.1 IDeAS : Data Persentase dan Peringkat Kabuapten/kota termiskin di Aceh

No	Kabupaten/kota	Jumlah penduduk Miskin 2016 (orang)	Persentase penduduk Miskin Tahun 2016	Perbandingan dengan tahun 2015
1	Gayo Lues	19,48 ribu	21,86%	-0,09
2	Aceh Singkil	25,09 ribu	21,60%	-0,12
3	Bener Meriah	29,82 ribu	21,43%	-0,12
4	Pidie	90,16 ribu	21,25%	+0,07
5	Pidie jaya	31,94 ribu	21,18%	-0,22
6	Aceh Barat	40,11 ribu	20,38%	-1,08
7	Simeulue	17,93 ribu	19,93%	-0,5
8	Subulussalam	14,99 ribu	19,57%	-0,82
9	Aceh Utara	115,05 ribu	19,46%	+0,26
10	Nagan Raya	30,31 ribu	19,25%	-0,88

Sumber: Data Kemiskinan diolah oleh IDeAS dari Publikasi data BPS RI, 3 Agustus 2017.

[4] BPS Kabupaten Gayo Lues

Badan pusat Statistik kembali merilis Data Kemiskinan dan Ketimpangan Kab/Kota tahun 2016 dengan menyajikan data terbaru mengenai angka kemiskinan diseluruh Kab/Kota yang ada diseluruh Indonesia. Hasil kajian Institute for Development of Acehnese Socienty (IDeAS) dari data terbitan BPS menunjukkan masih ada kabupaten dengan persentase tingkat kemiskinan sangat tinggi masih di atas 21% dan termasuk Kabupaten Gayo Lues.[5]

Tingkat Kemiskinan di Gayo Lues sampai tahun 2016 masih yang tertinggi di Aceh, sama seperti tahun 2015 lalu dan pada tahun 2017 mencapai 21,97% pada tahun 2018 sebanyak 20.70%. Dari 23 kab/kota yang di Aceh Gayo Lues masih menempuh urutan Tertinggi Kabupaten Termiskin di Aceh. Pengentasan Kemiskinan merupakan salah satu Tugas terpenting bagi Pemerintah Daerah. Padahal, sebenarnya kabupaten ini menyimpan potensi yang sangat kaya. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia. Gayo Lues juga memiliki sektor yang begitu luas seperti sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor pertambangan dan lain sebagainya.

Atas dasar kondisi kemiskinan yang semakin meningkat tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat di Daerah Kabupaten Gayo Lues?

[5] *http://lintasgayo.co/2017/08/08/ini-kabupaten-termiskin-di-aceh-versi-ideas*(diakses tanggal 11 maret 2019)

2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah pemekaran di Gayo Lues?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat di Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran di Gayo Lues.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah wilayah Kabupaten Gayo Lues dalam melakukan usaha-usaha guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
2. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca dan peneliti, khususnya bagi mahasiswa yang sementara menyusun skripsi yang berkaitan dengan masalah-masalah pelayanan publik dan kaitannya tehadap pemekaran kecamatan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Lestiawati (2018) yang berjudul Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitiaan kualitatif dengan teknis analisis deskriptif. Dimana penulis menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan lokasi penelitiannya adalah di

Pekon Lintuik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran desa ini dipengaruhi oleh Faktor ekonomi yang kurang sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan. Namun demikian adanya pemekaran desa yang berjalan lebih kurang selama 7 tahun ini membuahkan hasil yaitu percepatan dan pemerataan yang terjadi sabgat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari pemerintahan pasca pemekaran Desa.[6]

Penelitian yang dilakukan oleh Hasriani (2016) yang berjudul Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, Oleh Hasriani, 20 Juni 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif Kualitatif yang menggambarkan tentang dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan di desa Tafagapi dengan mengunakan data primer berupa informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa populasi dalam penelitian ini seluruh warga masyarakat Desa Tafagapi dengan penarikan sampel secara cluser random sebanyaj 25 KK masyarakat desa Tafagapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, setelah pemekaran Desa cukup memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat diDesa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari jumlah ketesediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu dari aspek pendidikan, kesehatan dan

[6] Lestiawati,"*pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan* (studi kasus Pekon Lintik kecamatan Krui selatan, Kabupaten Pesisir Barat), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas islam Negeri raden Intan Lampung, 2018, hal 10

sarana jalan yang cukup meningkat dari tahun sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran. [7]

Penelitian yang dilakukan oleh Lifia Anis Tahara Andi Lantara (2016) yang berjudul pengaruh Pemekarana Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dna Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang pemekaran wilayah Kecamatan Tana Lili. Pada umumnya kegiatan penilitian deskriptif meliputi pengumpulan data, analisis data, interprestasi data serta diakhiri dengan kesimpulan pada penganalisisan data tersebut. Penelitian ini lebih menekan pada data kuantitatif yang diperoleh melalui keusioner dan didukung oleh data kuliatatif melalui wawancara dengan informan dan responden dalam rangka mengetahui implikasi pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukkan 2 hal yakni, Pertama Kondisi pembangunan dan pelayanan publik setelah pemekaran Kecamatan Tana Lili menjadi lebih baik daripada sebelum pemekaran. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi di dukung oleh pemerintah dan masyarakat, pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan maupun pembangunan, dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik.[8]

---

[7] Hasriani, studi *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui kepulauan Kabupaten Morowali*, jurusan Ekonomi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas halu Oleo Kendari (2016) hal 15

[8] Lifia Anis Tahara Andi Lantara, *pengaruh Pemekarana Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dna Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara*, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassara (2016)

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan kepada kesejahteraan masyarakat yang ada di perkotaan dengan masyarakat yang ada di pedalaman di daerah pemekaran Kabupaten Gayo Lues.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Evaluasi

Evaluasi pada dasarnya merupakan suatu proses pengukuran dan pebandingan hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang ditetapkan. Dalam PP No. 39 Tahun 2006, definisi evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.[9]

Menurut Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul, evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Proses dari Evaluasi itu sendiri yaitu: pertama Input (Masukan) Input digunakan sebagai masukan agar sistem berfungsi, Evaluasi pada tahap awal program bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang akan dilaksanakan sesuai dengan masalah yang ditemukan, kedua Process (Proses) Proses diperlukan untuk mengubah masukan menjadi hasil (keluaran) yang direncanakan. Evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan sesuai dengan rencana awal, ketiga Output (Keluaran) Output (keluaran) merupakan hasil dari proses Evaluasi memperlihatkan apakah suatu program telah memberikan pengaruh terhadap perilaku sesuai rencana, keempat Dampak (Impact) Dampak ialah akibat dari keluaran dalam waktu yang lama. Evaluasi dampak memberikan

[9] Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006

gambaran atau informasi terkait angka kematian, perubahan penyakit dan produktivitas,

Landasan evaluasi pemekaran wilayah yang digunakan oleh penulis di dasarkan atas tujuan pemekaran wilayah itu sendiri yang terdapat pada PP No. 129 Tahun 2000 Bab 2 pasal 2 yaitu Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi, memepercepat pelaksanaan pembanguann perekonomian daerah, memepercepat pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanaan dan ketertiban, meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.[10]

2.2 Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran[11]. Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854). pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut

[10] Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 BAB 2 Pasal 2

[11] Soejono Soekanto, Sosiologi sebagai pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267

2.3 Konsep Pemekaran Wilayah

2.3.1 Pengertian Pemekaran Wilayah

Menurut Rasyid mengatakan bahwa pembentukan daerah pemekaran merupakan perluasan daerah dengan memekarkan atau meningkatkan status daerah yang dianggap mempunyai potensi sebagai daerah otonomi dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.[12]

J Kaloh, lebih lanjut mengatakan bahwa dalam konteks pemekaran daerah/wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber–sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.

Pemekaran daerah/wilayah lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonomi baru, bahwa daerah otonomi tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan sumber sumber pendapatan asli daeerah, sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah-wilayah

[12] Hasriani *studi dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Tafagapi Kecamatan Menui kepulauan kabupaten Morowali*, skrpsi 2016 jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, kendari

kelompok, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi lebih dari satu wilayah[13].

Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, selain itu juga Undang-Undang No 23 tersebut menyantumkan tentang pengertian Daerah, yaitu penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah atau lebih untuk kemudian membentuk pemerintahan sendiri.[14] Untuk itu, harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pemekaran yang dilihat dari perspektif politik administrasi pemerintahan pusat, pemekaran wilayah merupakan penambahan jumlah daerah baru (kota, daerah, provinsi, atau desa). Dengan penambahan daerah baru, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat, seperti penambahan jumlah kepala daerah dan semua struktur yang ada dibawahnya, dan hal demikian tersebut membutuhkan biaya rutin setiap bulan dan tahunan.[15]

Ratnawati berpendapat bahwa pemekaran saat ini tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normatif teoritis seperti yang tertera dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar untuk meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan demokrasi lokal untuk memaksimalkan akses publik

---

[13] Rosramadhana, *Bugaran AntoniusSimanjutak, strategi dan problem social politik pemerintahan otonomi daerah Indonesia*, hal 88

[14] Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

[15] Frans M. parera, dkk, *Demokrasi dan Otonomi, mencegah Disintegrasi Bangsa*, (Jakarta: PT. kompas media Nusantara, 2000) hal 163

kepemerintahan, mendekatkan pemerintahan dengan rakyatnya, dan menyediakan pelayanan publik dengan seefisien mungkin. [16]

2.3.2 Tujuan Pemekaran Wilayah

Salah satu tujuan dari pembentukan pemekaran suatu daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah.[17]

1. Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, jenis pelayanan terbagi tiga, antara lain;

a. Pelayanan Administratif adalah pelayaan yang penyediaan dokumen pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya: pelayanan dalam hal pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, surat tanda kendaraan bermotor, dan lain- lain.
b. Pelayanan Barang adalah pelayanan yang menghasilkan segala bentuk barang yang digunakan menjadi kebutuhan publik misalnya: Pemerintah menyediakan jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan lain sebagainya.

---

[16] Ibid.
[17] *Peraturan Pemerintah* No 129 Tahun 2000

c. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan dalam bentuk jasa yang di butuhkan oleh publik. misalnya: pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebaginya[18]

2. Percepat Pertumbuhan Kehidupan Demokrasi.

Kehidupan demokrasi pada Daerah pemekaran akan berimbas pada kehidupan demokrasi daerah induknya, yang akan berpengaruh pada kehidupan ditingkat Nasional. Baiknya kehidupan demokrasi ditingkat Nasional terkait dengan apa yang kita kenal sebagai pendidikan politik, training dalam kepemimpinan politik, dan stabilitas politik. Mengembangkan kehidupan Demokrasi di daerah pemekaran akan bermanfaat yang sangat besar diantaranya seperti, berkembangnya kesamaan (equality), kebebasan (liberty), bersifat tanggap (responsiveness).[19]

3. Pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah

Paska terbentuknya daerah otonomi baru, terdapat peluang yang besar bagi ekselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonomi baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

---

[18] Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

[19] https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf

Semakin mempermudah dalam menghadirkan investor yang berminat dalam membuka industri daerah yang menguntungkan.[20]

4. Peningkatan Potensi Daerah

Potensi daerah meupakan sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan daerah.

Dengan adanya pemekaran wilayah maka daerah akan lebih cepat dan mampu mengelola potensi yang ada didaerahnya. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyrakat daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraannya.

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban

Terwujudnya aman dan tertib didalam masyarakat akan sangat membantu untuk terwujudnya keamanan dan ketenteraman masyarakat, kondisi aman ini sangat perlu dipelihara demi stabilitas daerah

2.3.3 Urgensi Pemekaran wilayah.

Menurut Kaloh, terdapat beberapa urgensi dari adanya pembentukan dan pemekaran wilayah,yaitu:[21]

1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,

---

[20] Pelita volume 3, nomor 2 http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274

[21]Kaloh. J. 2007 . *mencari bentuk Otonomi Daerah suatu solusin dalam menjawab kebutuhan lokal dan Tantangan global*. Jakarta:PT. rineka cipta.

2. Memperpendek *span of control* (rentang kendali) sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien, dan terkendali,
3. Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuh kembangkan inisiatif, kreatifitas, dan inovasi masyarakat,
4. Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran berdemokrasi masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik.

2.4 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas, kesejahteraan juga bersifat objektif sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu itu berbeda akan tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau Keluarga tersebut dapat terpenuhi, sedangkan apabila tidak terpenuhi kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut dibawah kemisinan.[22] Sedangkan Pengertian kesejahteraan sosial dapat ditegaskan dengan Undang-Undang No 6, Tahun 1974, tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan, bab 1, pasal 2, sebagaimana dikutip berikut ini

[22] Vera wullur, *Mengoptimalkan kepedulian sosial masyarakat* pt grasindo jakarta 20019 hal 13

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azazi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila".[23]

Sedangkan kesejahteraan sosial menurut Whithaker dan Feerico merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang paling penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemanpuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera.[24]

Dari hasil *pre confrence working for the 15th international confrence of social welfare* kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya juga tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dalam berbagai kehidupan

[23] Undang-Undang No 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan

[24] Dr. suwandi, *Desentralisasi Fiskal dan dampaknya pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan,, dan kesejahteraan di Kabupaten/kota induk Provinsi papua*, CV BUDI UTAMA Yogyakarta, Oktober 2015.

dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya. [25]

2.4.2 Indikator kesejahteraan

Indikator kesejahteraan merupakan ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Menurut BPS pada tahun 2018 Indikator Kesejahteraan Rakyat meliputi beberapa hal diantaranya yaitu[26]

1. Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu negara, tetapi di sisi lain penduduk juga dapat menjadi suatu beban bagi negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan dapat menyebabkan kesenjangan di dalam masyarakat. Masalah lain juga akan muncul terutama yang menyangkut tentang penyediaan berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, termasuk kebutuhan sekunder berupa pendidikan dan kesehatan yang baik dan penyediaan lapangan pekerjaan.

2. Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung ekonomi suatu

---

[25] Miftachul Huda. (2009). Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

[26] Badan Pusat Statistik, indikator kesejahteraan rakyat welfare Indocators 2013, (Jakarta, Badan Pusat Statistik 2013), hal 3

Negara/wilayah semakin baik. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan sangat penting yang meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun nonformal.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, daerah dimana asal seseorang, agama dan gender, berhak untuk memperoleh pendidikan yang dimiliki.

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan gambaran aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Indikator

ketenagakerjaan misalnya dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang ada, maka tentu saja akan terjadi peningkatan pengangguran yang selanjutnya dapat menimbulkan masalah-masalah sosial.

5. Kemiskinan

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah, besarnya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

6. Perumahan dan Lingkungan

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Berdasarkan tingkat intensitas kebutuhannya, manusia memiliki tiga kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan. Papan atau juga dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang dapat menjadi menjadi tempat bernaung manusia. Perumahan sebagai salah satu bentuk dari pemukiman, merupakan salh satu kebuhan manusia yang paling dasar. Selain sebagai salah satu kebutuhan dasar, rumah dan

kelengkapannya merupakan faktor penentu indicator kesejahteraan rakyat dan menjadi salah satu target Milenium Development Goals (MDGs) tahun 2020.

7. Sosial lainnya

Perjalanan "wisata" dapat menjadi salah satu indikator sosial yang menandakan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata.

2.4.3 Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah melalui aparat pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Bentuk pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan pemeritahan atau pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.

Aparat pemerintah sebagai unsur pemerintah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur yang dilayani. Sikap dan perilaku aparat pemerintah akan menjadi suatu ukuran keberhasilan pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan, dan masyarakat akan merasa puas serta tidak mengeluh.

Selain daripada pelayanan kepada masyarakat pemerintah juga ikut berperan dalam meningkatkan pembangunan perekonomian daerah. Pembangunan perekonomian daerah yang dimaksud adalah suatu proses di mana pemerintah

daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Potensi daerah juga memerlukan peran pemerintah dalam pengembangannya. Potensi daerah merupakan segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan daerah. Dalam iklim kebebasan baru di daerah sebagai akibat pemberlakuan otonomi, kemampuan membaca dan mengoptimalkan potensi sangatlah penting. Sebab, meskipun terdapat konsep perimbangan sumber daya antara pusat dan daerah, namun semangat otonomi lebih menghendaki agar daerah dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya.

Bantuan pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik yang berbentuk dana, personalia maupun prasarana, merupakan komponen pelengkap untuk mendukung kapasitas daerah. Namun kapasitas asli daerah (terutama di bidang keuangan) sangatlah penting guna mempercepat pengelolaan potensi darah. Dengan adanya pemekaran wilayah maka daerah akan lebih cepat dan mampu mengelola potensi yang ada di daerahnya. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraannya

2.5 Kerangka Pemikiran

Kabupaten Gayo Lues memiliki potensi yang dapat dikembangkan seperti potensi di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, serta jasa dan penunjang. Hal itu yang menjadi faktor pendorong untuk terbentuknya Gayo Lues sebagai kabupaten baru di Provinsi Aceh. Setelah pemekaran wilayah dapat terealisasikan maka potensi yang ada di Kabupaten Gayo Lues dapat dikembangkan dan dikelola secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat. Potensi yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan masyarakatnya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Dengan adanya pemekaran wilayah juga diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta pelayanan pengurusan identitas penduduk. Pemekaran wilayah juga seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga masyarakat memiliki kesempatan kerja dan secara langsung pendapatan masyarakat juga akan bertambah.

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

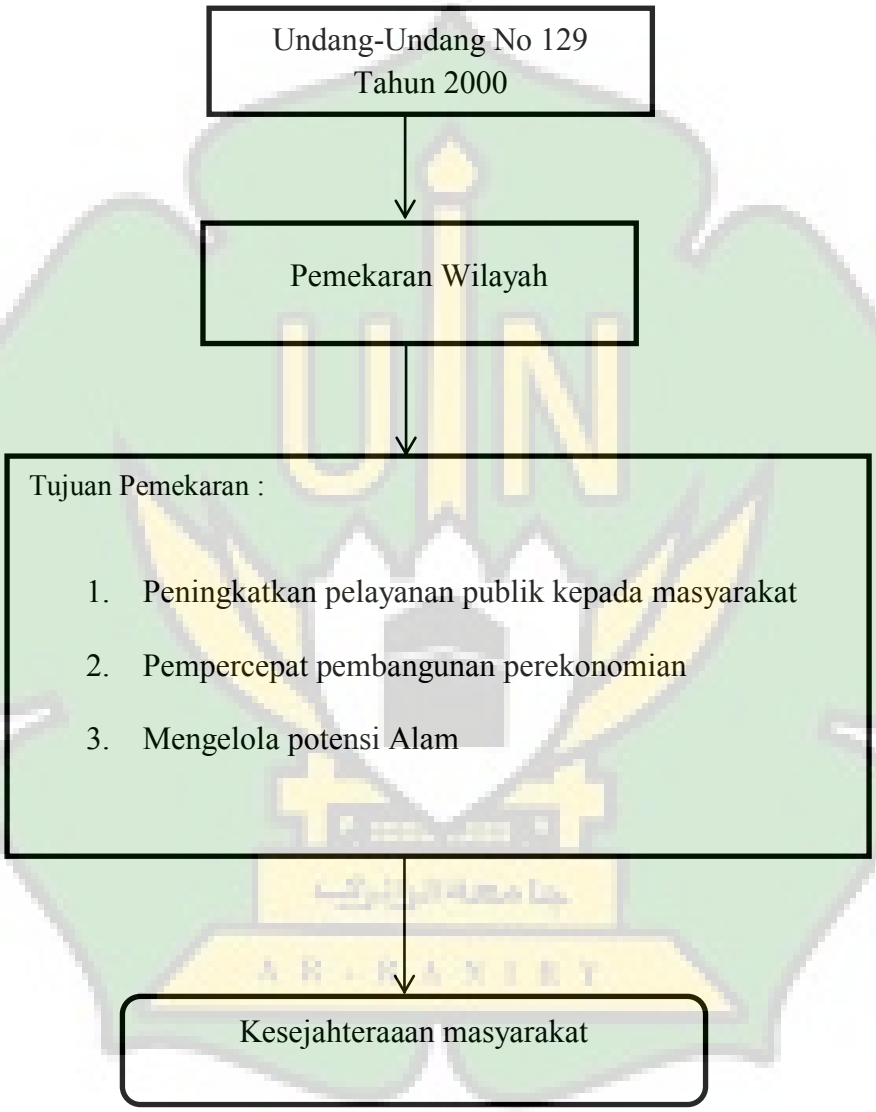

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini mengunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang memberikan gambaran tentang Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kabupaten Gayo Lues yaitu di Kantor Bupati, Dinas Sosial dan dua kecamatan yang ada di Gayo Lues yaitu Kecamatan Blangkejeren dan Kecamatan Pining. Dikarenakan Kabupaten Gayo Lues sebagai wilayah pemekaran dari kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues merupakan Kabupaten yang masih keterlambatan dalam hal pembangunan dapat dilihat dari kemiskinan yang bertambah.

3.3 Sumber Data

Menurut Arikunto sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden/narasumber, yaitu orang yang menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan., sumber data dapat diperoleh dari data primer dan data skunder[27]

[27] Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. PT. Rineka Cipta

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari responden/narasumber di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi langsung di Kabupaten Gayo Lues. Jumlah total dari keseluruhan informan yaitu berjumlah 16 orang diantaraya yaitu:

a. Kepala bagian Pemerintahan di kantor sekretariat Kabupaten Gayo Lues

   Alasan peneliti mengambil informan kepala bagian Pemerintahan adalah karena kepala bidang tersebut yang lebih memahami seluk beluk dari Pemekeran Wilayah serta yang berkaitan dengan penelitian ini yang sesuai dengan peratura yang berlaku.

b. Kepala bagian Perekonomian di kantor sekretariat Kabupaten Gayo Lues

   Alasan peneliti mengambil informal kepada bagian perekonomian dikarenakan mereka lebih mengetahui bagaimana keadaan ekonomi Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues

c. Bagian Pemberdayaan di Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues
d. Camat Blangkejeren
e. Camat Pining
f. 4 Orang Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari Undang-Undang, Profil Kabupaten, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk,

Rentang Kendali, Perekonomian, dan sarana prasarana. Catatan catatan, data statistik, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan kegiatan, foto-foto dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan perkembangan wilayah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto menyusun instrumen adalah langkah-;langkah yang penting dalam penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama apabila peneliti menggunakan metode yang memiliki cakupan besar. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut[28]

1. Observasi

Nasution dalam Hikmat, teknik observasi dapat menjelaskan secara luas dan rinci tentang masalah-masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terinci mengenai keadaan lapangan,kegiatan manusia, dan sistem sosial, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yaitu di Kabupaten Gayo Lues. Teknik ini menuntun adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitian tersebut. [29]Teknik pengumpulan data melalui observasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues setelah Pemekaran Wilayah.

---

[28] Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. PT. Rineka Cipta

[29] Dr Husein umar, se.,mba.,m.m 2011.*metode penelitian untuk skripsi dan tesis* Raja Grafindo Persada Jakarta hal 51

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu yang telah ditentukan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber mengenai pemekaran wilayah di Kabupaten Gayo Lues diantaranya yaitu kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Dinas Sosil, kecamatan Blangkejeren dimana kecamatan ini merupakan kecamatan yang berada di pusat pemerintahan dan kecamatan Pining kecamatan ini merupakan kecamatan yang terluas di Gayo Lues.

3. Dokumentasi

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara penelitian kualitatif. Dalam penelitian, peneliti membutuhkan dokumentasi untuk melengkapi data dalam analisis yang sedang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen yang mendukung seperti media massa (Koran, majalah, dan internet), buku-buku, proposal pengajuan pemekaran wilayah. maka dokumentasi merupakan sarana pelengkap sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat dan agar mempunyai bukti yang cukup untuk dapat dipertanggungjawabkan.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif. Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Oleh karena itu, maka dalam penelitian kualitatif ini data yang di peroleh dianalisis dengan langkah langkah peneliti dalam menganalisis data adalah yang sesuai apa yang dikatakan Sugiyono sebagai berikut:[30]

1. Reduksi data Mereduksi data berarti merangkum hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data-data yang telah direduksi atau dirangkum tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa dilokasi kejadian serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
2. Data display (penyajian data) Setelah data tersebut direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat.
3. Verifikasi/penarikan kesimpulan Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan di atas.

---

[30] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2007), hal: .92.

Jenis penelitian kualitatif memungkinkan analisa data dilakukan ketika berada di lapangan atau setelah kembali dari lapangan, analisis data pada saat pengumpulan data merupakan analisis sesudah data terkumpul seluruhnya akan menghasilkan temuan akhir suatu penelitian. Proses penganalisasian data dimulai dari pengumpulan data, yaitu dengan mengkaji data yang diperoleh dari berbagai teknik mengumpulkan data selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, diproses dari peristiwa-peristiwa sosial yang ditemukan dalam kajian lapangan yang tersedia dari berbagai sumber yaitu: dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen yang didapatkan selama penelitian melalui pendekatan kualitatif.

Pelaksanaan analisis data atau menggabungkan dari keduanya. Data-data hasil dari penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas serta logis dengan cara mengaitkan berbagai temuan data. Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan dari hasil wawancara dan observasi dengan disertakan cuplikan wawancara berupa sebuah kalimat lansung disertai komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang.[31] Gayo Lues yang beribukotakan Blangkejeren, memiliki luas wilayah seluas 5.719,58 Km^2.

Secara Astronomis Kabupaten Gayo Lues terletak pada 03°40'-04°17' LU dan garis bujur 96°43'-97°55' BT. Secara geografis terletak pada sebelah Utara bersebelahan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Timur, Selatan bersebelahan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabpaten Aceh Barat Daya, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah Timur bersebelahan dengan Kab.upaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Langkat (Prov. Sumatera Utara).

Secara Administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 kemukiman, 144 kampung. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah kecamatan Pining dengan luas wilayah 1617,14 Km^2 (28,27% dari luas wilayah keseluruhan), dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeren yang

[31] *Badan Perencanaan Kabupaten Gayo Lues*

juga sebagai pusat pemerintahan dengan luas wilayah sebesar 158,74 Km^2 (2,78% dari total luas wilayah keseluruhan).

Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang berada di ketinggian 500 meter hingga 2000 meter di atas permukaan laut, fisiografis wilayahnya didominasi daerah perbukitan dan pegunungan. Atas alasan ini pula kabupaten ini mendapat julukan "Negeri Seribu Bukit". Kabupaten yang berhawa dingin dengan suhu dapat mencapai 15^0 Celcius ini memiliki topografi wilayah yang rata-rata kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%.

4.1.2 Sejarah Kabupaten Gayo Lues

Berhubung karena keterbatasan wewenang dan ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan juga minimnya Pendapatan Anggaran Daerah Aceh Tenggara ada kesan kemajuan pembangunan Gayo Lues dianaktirikan, pada pertengahan tahun 90-an transportasi Gayo Lues mendekati titik terang dengan berfungsinya sarana jalan, sehingga menjadikan Kota. Blangkejeren sebagai simpang empat, yaitu: Blangkejeren – Takengon; Blangkejeren – Aceh Selatan; Blangkejeren Kutacane dan Blangkejeren – Aceh Timur. Hal ini memicu percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Gayo Lues mendukung PMDN dan PMDA untuk menanam modal.

Ada juga faktor-faktor eksternal yaitu dengan diresmikannya Pembantu Bupati Simeulu menjadi Kabupaten Administratif, menyusul Pembantu Bupati Bireuen dan Pembantu Bupati Singkil menjadi Kabupaten. Hal inilah yang merangsang masyarakat Gayo Lues untuk mengikuti jejak daerah-daerah tersebut di atas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pada akhir tahun 1997 beberapa orang tua bermusyawarah di Blangkejeren untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi Kabupaten Administratif. Untuk itu dibentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren, Kabupaten Aceh Tenggara. Maksud dan tujuan dari panitia ini disampaikan kepada Bupati Aceh Tenggara, Bupati sangat setuju dan mendukung gagasan resebut. Panitia meminta Bupati agar menyurati Gubernur dan Ketua DPRD I Aceh. Permintaan ini disanggupi Bupati dan Ketua DPRD II Aceh Tenggara dengan mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua DPRD Aceh.

Petinggi Aceh lalu menyurati menteri yang terkait di Jakarta termasuk pimpinan DPR, Pimpinan Parpol dan juga yang dianggap patut. Proses di Jakarta sedikit agak terhambat mengingat situasi negara belum begitu stabil. Pada Tahun 2000 delegasi dikirim ke Jakarta dari Aceh Tenggara untuk penjajakan dan menemui Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR dan Pimpinan parpol untuk mohon bantuan. Setelah melalui proses yang agak panjang akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2001 DPOD menetapkan 4 Calon Kabupaten dari Aceh dinyatakan lulus menjadi Kabupaten, sedangkan Gayo Lues harus diulang kaji lagi. Masyarakat Gayo Lues, Pemda Aceh Tenggara, Pemda Daerah Aceh, merasa tidak puas dan kecewa, lalu mengirim delegasi lagi ke Jakarta menemui Petinggi di Jakarta termasuk Wapres.

Akhirnya DPOD menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 2001. Tidak lama kemudian pemerintah mengusulkan RUU pembentukan Kabupaten Gayo Lues ke DPR-RI. Dalam

sidang Paripurna DPR-RI tanggal 11 Maret 2002 seluruh fraksi menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten.

Pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Lues beserta 21 Kabupaten/Kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai sebuah Kabupaten. Pada tanggal 6 Agustus 2002 Gubernur NAD, Ir. Abdullah Puteh melantik Ir. Muhammad Ali Kasim, MM menjadi Penjabat Bupati Gayo Lues di Kutacane. Dengan demikian selesailah sebuah perjuangan untuk mewujudkan sebuah Kabupaten yang dicita-citakan.

4.1.3 Visi Misi Sekretariat Kabupaten Gayo Lues

Agar terlaksananya pembangunan dengan baik di Kabupaten Gayo Lues, maka harus mempunyai visi misi yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam upaya pembanguan suatu daerah. Visi misi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Yaitu

a. Visi

"Gayo Lues yang islami, Mandiri, dan sejahtera"

b. Misi

1. Meningkatkan penerapan syariat islam dan nilai budaya Gayo Lues yang islami di semua aspek kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang Terampil, Mandiri, dan Partisipatif dalam pembangunan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gayo Lues melalui pemberdayaan dan pemerataan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan

4. Mewujudkan tata pemerintahan yang responsif, dan akuntabel melalui penguatan kelembagaan pemerintah yang bersih, sederhana dan berwibawa
5. Mewujudkan Implementasi UUPA dan perjanjian damai MOU HELSINKI sesuai dengan situasi dan potensi Daerah.

4.1.4 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Gayo Lues

Sesuai dari hasil wawancara dengan Rawandi Tarabuana selaku pegawai di Kantor Sekretariat Daerah, mengatakan bahwa mata pencaharian masyarakat di kabupaten Gayo Lues berkembang di beragam sektor.[32]

Mata pencaharian penduduk Gayo Lues mayoritas sebagai petani dan peternak. Selain itu ada juga yang mendulang emas, pegawai instansi pemerintahan, pedagang, dan juga sebagai seniman. Pada hal tersebut jika sektor ini dikelola secara baik akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarganya. Namun yang menarik adalah meski hanya sebagai mata pencaharian petani, hasil produksi memiliki nilai produktifitas lebih tinggi dibandingkan dengan hasil produksi lainnya.

4.1.5 Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Blangkejeren merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues yang sekaligus Ibukota Kabupaten Gayo Lues, pusat Ekonomi dan pusat pemerintahan Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan Blangkejeren terletak di pusat Kota Gayo Lues dengan luas daerah 170,37 Km^2 kecamatan Blangkejeren

[32] *Wawancara di Kantor Sekretariat Daerah Tanggal 13 Agustus 2019*

memiliki 3 kemukiman dan 21 desa, batas-batas wilayah di Kecamatan Blangkejeren sebelah Utara bersebelahan dengan kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Rikit Gaib, sebelah Selatan bersebelahan dengan Kecamatan Blangpegayon dan Putri Betung, sebelah Barat bersebelahan dengan kecamatan Kecamatan Kutapanjang dan Blang Pegayon dan sebelah timur bersebelahan dengan kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Putri Betung, kecamatan Blangkejeren beralamat di Jl. Blangkjeren-Kutacane, Desa Cempa[33].

4.1.6 Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues

Kecamatan Pining merupakan kecamatan yang paling Luas dan juga Jauh dari Pusat Kota. Kecamatan Pining terletak di Pegunungan dengan luas daerah 101,660 $Km^{2,}$ kecamatan Pining memiliki 2 kemukiman dan 9 desa, batas-batas wilayah di Kecamatan Pining sebelah Utara bersebelahan dengan Aceh Timur, sebelah Selatan bersebelahan dengan Kecamatan Dabun Gelang, sebelah Barat bersebelahan dengan kecamatan Putri Betung dan sebelah timur bersebelahan dengan Lukup Kabupaten Aceh Timur, kecamatan Pining beralamat di Desa Pining.[34]

4.2 Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues

Landasan evaluasi pemekaran wilayah berdasarkan tujuan dari pemekaran wilayah itu sendiri. Dengan adanya pemekaran wilayah dapat terciptanya

---

[33] *Seksi Pelayanan dan Kesejahtraan sosial Kantor Kecamatan Blangkejeren*
[34] *Seksi pelayanan dan kesejahteraan Sosial Kantor Kecamatan Pining.*

kesejahteraan masyarakat dalam batasan wilayah yang kecil. Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu :[35]

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalaui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Bab II Pasal 2, salah satu tujuan dari pembentukan, pemekaran suatu daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, dan pengelolaan potensi daerah.[36]

1. Peningkatan Pelayanan Publik terhadap Masyarakat

Pemekaran daerah berpengaruh langsung terhadap peningkatan pelayanan pemerintahan daerah terhadap masyarakat. Alasan utama mengapa pelayanan publik bertambah baik kepada masyarakat yaitu jangkauan wilayah dari pelayanan

---

[35] Yayan Amroni. *.Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Tahun 2010-2016. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[36] *Peraturan pemerintah No 129 Tahun 2000*

tersebut semakin dekat di banding dengan sebelum dimekarkannya sebuah wilayah.[37]

Untuk mengukur efektivitas dan kualitas dari pelayanan publik pada indeks kinerja dapat diukur juga dari segi pendidikan, kesehatan dan fasilitas infrastruktur transportasi darat.[38]

Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, jenis pelayanan terbagi tiga antara lain: pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.

Pertama Pelayanan administratif adalah pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dalam bentuk kebutuhan masyarakat berupa dokumen penting, seperti pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, surat tanda kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, ijin mendirikan bangunan dan lain- lain.

Berdasarkan wawancara dengan Khaidir warga Kecamatan Pining, yang mengatakan bahwa,

> "Pelayanan di daerah ini masih sangat rendah dikarenakan belum efektif dan efisien walaupun setelah berpisah dari Aceh Tenggara, dimana kehadiran para pegawai di kantor kecamatan saja belum tepat waktu dan juga ada yang tidak mengetahui perannya sebagai pegawai" [39]

Berdasarkan pernyataan dari informan tersebut terlihat bahwa pelayanan administrasi kepada masyarakat masih kurang memuaskan. Hal ini disebabkan

---

[37] Emie Yuliati 2011. *Evaluasi Hasil Pemekaran (studi kasus pemekaran kabupaten)*, Tesis Jakarta Universitas Indonesia

[38] Asosiasi Ilmu Pemerintahan ,perguruan tinggi Muhammadiyah prosiding seminar nasional menyongsong pemilu 2014:*Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Politik Indonesia berkemajuan.* Makassar,21 juni 2013

[39] *Wawancara Tanggal 15 Agustus 2019*

oleh kurang disiplinnya para pegawai dan juga kurang nya pengetahuan akan teknologi terbaru di era sekarang. Selaku pihak pemerintahan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah suatu kewajiban.

Kedua Pelayanan barang yang dimaksud adalah pelayanan seperti: pemerintah menyediakan jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan lain sebaginya. Pelayanan yang menghasilkan segala bentuk pelayanan barang yang menjadi kebutuhan semua masyarakat mulai dari desa yang tepencil sampai ke desa-desa yang maju seperti jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih. Pelayanan ini sangat penting karena sentiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan.

Seperti hasil wawancara dengan Khaidir salah seorang warga Kecamatan Pining mengatakan bahwa,

> "Setelah pemekaran pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Pining sudah mulai membaik dalam penyediaan listrik air bersih namun belum menyediakan jaringan telepon atau jaringan internet dikarenakan setiap pemasangan jaringan telepon atau jaringan internet selalu dicuri oleh masyarakat dikarenakan kurangnya pengawasan".[40]

Sedangkan wawancara dengan Kautsar salah seorang dari warga Kecamatan Blangkejeren menyatakan bahwa,

> "Setelah adanya pemekaran pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Blangkejeren sudah sangat baik, baik dalam pelayanan jaringan telepon jaringan Internet, penyediaan tenaga listrik maupun air bersih dikarenakan kecamatan Blangkejeren merupakan kecamatan pusat dan kecamatan yang diprioritaskan.. Dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat semakin mudah dalam beraktivitas".[41]

---

[40] *Shaifullah Wawancara 15 Agustus 2019*
[41] *Kautsar Wawancara tanggal 13 Agustus 2019*

Dapat dilihat berdasarkan pernyataan informan bahwa ada perbedaan antara Kecamatan Pining dengan Kecamatan Blangkejeren dari segi pelayanan, baik pelayanan barang maupun pelayanan administratif. Perbedaan antara kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pining masih sangat tertinggal dikarenakan tidak adanya jaringan telepon dan apabila masyarakat membutuhkan informasi maka harus menuju ke Kecamatan Blangkejeren yang menempuh waktu 3 jam bahkan lebih.

Ketiga Pelayanan jasa yang dimaksud adalah berupa pelayanan seperti: pendidikan kesehatan, transportasi dan lain sebagainya. Pengembangan sektor pendidikan adalah bagian yang penting dalam fungsi dasar pelayanan publik. Dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan menyebutkan betapa pentingnya penguatan dan, penyebaran pendidikan sehingga mampu menjangkau seluruh nusantara. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyediakan pendidikan yang layak karena pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun dalam hal berbagai kendala menyebabkan masih belum optimalnya pelayanan di bidang pendidikan, baik dari sisi ketersediaan sarana pendidikan sampai pada ketersediaan tenaga pendidik.

Tabel 4.1 Rasio Guru-Murid Kabupaten Gayo Lues 2018

No.	Kecamatan	TK	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA
1	Kuta Panjang	10	13	0	9	0	7	0
2	Blang jerangon	8	14	8	13	0	13	0
3	Blangkejeren	11	16	12	12	7	16	6
4	Putri Betung	6	15	12	13	8	9	6
5	Dabun Gelang	14	10	9	6	3	6	0
6	Blang Pegayon	5	20	2	15	16	10	8
7	Pining	9	16	0	15	0	11	0

8	Rikit Gaib	9	8	9	9	4	6	0
9	Pantan Cuaca	10	9	8	9	0	10	0
10	Terangun	6	16	3	14	0	10	0
11	Tripe Jaya	12	23	7	10	0	10	0
Gayo Lues		10	14	9	11	9	10	7

Sumber: BPS Gayo Lues 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio guru-murid di Kabupaten Gayo Lues masih dalam angka besar. Dari tabel juga diketahui bahwa tingkat SD yang memiliki rasio paling tinggi sebesar 14. Hal ini menyatakan bahwa masih kekurangan guru dalam proses belajar-mengajar. Rasio yang terkecil adalah sekolah tingkat MA dengan sebesar 7. Hal ini dikarenakan jumlah siswa pada MA yang sedikit.

Ketersediaan jumlah dan kualitas tenaga pendidik (guru) akan sangat berpengaruh dalam proses belajar-mengajar, semakin besar rasionya (murid) semakin tinggi beban kerja seorang guru, yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas belajar bagi siswa. Dengan rasio yang besar juga akan mempersulit guru untuk melakukan pengawasan dan pendekatan pendidikan yang personal bagi siswa sehingga ukuran pendidikannya akan digeneralisasi. Rasio siswa per guru menunjukkan kecenderungan menurun baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan lanjutan tingkat atas. Kecenderungan rasio guru yang semakin baik ini menunjukkan efektivitas dalam pelayanan publik di bidang pendidikan berupa penyediaan tenaga pendidik yang semakin baik sebagai dampak dari pemekaran.

Disini peneliti membedakan pendidikan yang ada di Kecamatan Pining dengan kecamatan Blangkejeren. Kecamatan pining merupakan kecamatan terluas

dan juga termasuk kecamatan yang masih tertinggal dan juga masih kurangnya dari segi pendidikan sedangkan Kecamatan Blangkejeren dimana Kecamatan yang paling kecil dan berada di tengah tengah pemerintahan Kabupaten Gayo Lues.

Hasil wawancara dengan Shaifullah selaku Camat Pining dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang dampak pemekaran wilayah mengatakan bahwa,

> "Sejak pemekaran wilayah pada tahun 2002 pemerintah sangat memperdulikan masyarakat dari berbagai macam segi pembangunan terutama dari segi pendidikan sudah mulai membaik dari sebelumnya dan pembangunan rumah fakir miskin juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah dan juga bantuan-bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti jalan lintasan namun disini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah dimana masyarakat awam masih belum sepenuhnya menerima apa yang disarankan oleh pemerintah seperti halnya pendidikan dimana disini orang tua belum sepenuhnya mendukung seperti perkataan orang tua kepada guru yang mengatakan bahwa (buk anak saya gak sekolah karena harus jaga adiknya karena saya ke kebun)".[42]

Sementara itu hasil wawancara dengan Abdullah selaku pegawai di kecamatan Pining dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukuran dampak pemekaran mengatakan bahwa:

> "Selama pemekaran kondisi masyarakat masih perlu perhatian khusus dari para pemerintah pusat dan harus memberikan fasilitas-fasilitas publik yang cukup yang akan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Harapan saya, semoga pemerintah membangun fasilitas sekolah yang memadai untuk anak-anak kami sehingga pendidikan anak-anak Kecamatan Pining semakin bermutu".[43]

Dari beberapa hasil wawancara diatas perbedaan antara kecamatan Pining dengan kecamatan Blangkejeren baik dari segi pemerintahan, pendidikan, dan

---

[42] *Wawancara 15 Agustus 2019*
[43] *Wawancara 15 Agustus 2019*

sebagainya. Perbedaan dari hal pendidikan diantaranya yaitu dari segi mutu pendidikan, tenaga kerja (guru), sarana dan prasarana dan dari pengajaran juga sangat berbeda. Kecamatan Pining lebih tertinggal dari pada kecamatan Blangkejeren.

Sementara itu hasil wawancara dengan Ena Malikussaleh selaku camat Blangkejeren mengatakan bahwa,

> "Selama pemekaran Kecamatan Blangkejeren kondisi masyarakat sudah semakin membaik dan perhatian pemerintah juga semakin mengarah ke Kecamatan Blangkejeren karena kecamatan ini merupakan ibukota Gayo Lues. masyarakat sangat puas dengan apa yang telah diberikan pemerintah, dengan fasilitas publik yang membaik masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti Fasilitas pendidikan yang baik".[44]

Sementara itu wawancara dengan Fadhlisyah, selaku Sekcam Kecamatan Blangkejeren mengatakan bahwa,

> "Setelah pemekaran, Kecamatan Blangkejeren pembangunan sudah sangat membaik dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sudah banyak sarana yang dirasakan diantaranya. Seperti sarana pendidikan yang memadai dibanding sarana pendidikan dikecamatan yang lainnya, dan juga bantuan masyarakat miskin sudah banyak yang ada sehingga tingkat kemiskinan di Kecamatan Blangkejeren tidak terlalu banyak karena pemerintah lebih dominan kepada masayrakat yang ada di kecamatan Blangkejeren. Namun Jika dibilang puas, memang belum sangat puas akan tetapi apa yang sudah diberikan pemerintah kepada Masyarakat sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri". [45]

Dari hasil wawancara, peneliti perbedaan antara kesejahteraan masyarakat di kecamatan Pining dengan kecamatan Blangkejeren dimana dapat dilihat dari sarana prasarana pendidikan. Selain daripada itu motivasi warga untuk mendapatkan pendidikan juga masih kurang karena keadaan ekonomi yang masih

---

[44] *Wawancara 14 Agustus 2019*
[45] *Wawancara 11 Agustus 2019*

kurang. Kurang nya keadaan ekonomi masyarakat mengindikasikan bahwa keadaan masyarakat belum dalam kesejateraan. Hal ini membutuhkan besarnya peran dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Provinsi Aceh 2018

No.	Kabupaten/ Kota	Tidak sekolah/ tidak tamat SD	SD/ MI/ SDLB/ Paket A	SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	SMA/ MA/ SMK/ MAK/ SMLB/ Paket C	Diploma I- III	D IV/ S1- S3
1	Simeulue	19,46	28,97	16,99	24,14	3,70	6,73
2	Aceh Singkil	25,81	23,42	15,46	24,41	3,17	7,73
3	Aceh Selatan	20,78	27,67	20,93	20,11	3,78	6,73
4	Aceh Tenggara	19,68	23,32	19,81	27,50	3,04	6,58
5	Aceh Timur	21,61	31,09	20,57	21,13	1,94	3,65
6	Aceh Tengah	16,67	21,94	22,55	28,65	2,41	7,77
7	Aceh Barat	14,78	27,15	18,89	28,49	4,17	6,51
8	Aceh Besar	20,69	18,14	20,23	24,89	5,25	10,79
9	Pidie	18,50	22,60	23,04	25,01	3,99	6,87
10	Bireuen	18,03	25,45	22,09	24,69	3,05	6,69
11	Aceh Utara	18,42	31,97	21,32	22,15	1,56	4,59
12	Aceh Barat Daya	21,88	30,62	15,67	22,42	3,08	6,33
13	Gayo Lues	23,95	26,72	16,55	19,81	2,80	10,17
14	Aceh Tamiang	20,69	26,22	17,75	26,29	3,29	5,77
15	Nagan Raya	21,99	26,19	18,67	24,74	3,57	4,84
16	Aceh Jaya	18,43	31,82	17,67	23,16	2,79	6,14
17	Bener Meriah	14,23	23,19	24,94	30,22	2,30	5,13
18	Pidie Jaya	17,89	23,36	24,07	24,87	2,19	7,62
19	Banda Aceh	12,68	7,42	14,81	39,56	6,41	19,12
20	Sabang	11,93	14,85	15,86	38,50	6,14	12,72
21	Langsa	15,19	13,73	16,28	38,12	3,24	13,43
22	Lhokseumawe	12,02	19,92	15,46	38,14	3,57	10,89
23	Subulussalam	22,24	29,19	17,56	21,89	2,56	6,57
	Aceh	**18,58**	**24,43**	**19,85**	**26,25**	**3,30**	**7,60**

Sumber: BPS Provinsi Aceh 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Gayo Lues yang tidak sekolah atau tidak tamat SD sejumlah 23,95%. Penduduk dengan ijazah setara SD sejumlah 26,72%. Penduduk yang memiliki ijazah setara SMP

sejumlah 16,55%. Penduduk dengan memiliki ijazah setara SMA sejumlah 19,81%. Penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat D I- III ada sejumlah 2,80%. Serta penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat S1- S3 ada sejumlah 10,17%. Hal ini menunjukkan masih banyak penduduk yang memiliki tingkat pendidikan setara SMP.

Aspek penting lain dari kesejahteraan adalah kualitas dari fisik penduduk yang dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung ekonomi suatu Negara/wilayah. Namun sebaliknya jika keadaan kesehatan masyarakat tidak bermutu, maka keadaan ekonomi juga menurun. Untuk mencapai sasaran tersebut maka pemerintah harus memenuhi akses pelayan kesehatan di kabupaten tersebut. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat pada tabel berikut,[46]

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Gayo Lues

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Polindes	Puskesmas Pembantu
1	Kuta Panjang	0	1	1	9	2
2	Blang jerangon	0	1	0	7	3
3	Blangkejeren	0	1	7	9	6
4	Putri Betung	0	1	0	9	4
5	Dabun Gelang	0	1	0	7	4
6	Blang Pegayon	1	1	0	10	3
7	Pining	0	2	0	3	3
8	Rikit Gaib	0	1	0	7	1

[46] *Dinas Kesehatan Kabupaten gayo Lues*

9	Pantan Cuaca	0	1	0	9	3
10	Terangun	0	1	0	17	6
11	Tripe Jaya		1	0	9	3
Jumlah		1	12	8	98	40

Sumber: BPS Gayo Lues 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa di Kabupaten Gayo Lues sarana kesehatan tersedia sebagai tempat melayani masyarakat. Namun dengan adanya sarana yang memadai masih dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkompeten di bidang nya. Terlihat pada tabel sarana kesehatan di Kecamatan Blangkejeren lebih banyak dibandingkan dengan sarana kesehatan yang terletak di Kecamatan Pining.

Dengan adanya pemekaran, Gayo Lues memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran. Pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan Alokasi Anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan Birokrasi di daerah hasil pemekaran.

2. Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian

Paska terbentuknya Kabupaten Gayo Lues terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah ini sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infarastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik juga menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, Kabupaten Gayo Lues memungkinkan mengeluarkan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi.

Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah di Gayo Lues sebagai hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal, terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah lainnya. Melalui kebijakan pembangunan ekonomi wilayah yang menjangkau seluruh wilayah, akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan untuk dilakukan dengan harga yang murah.

Menurut Kuncoro, secara tradisional pembangunan memilik arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu Negara.[47] Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten atau kota.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan gerak berbagai sektor pembangunan, dan juga adalah sumber penciptaan lapangan kerja. Adanya peningkatan nilai tambah di perekonomian mengisyaratkan peningkatan aktifitas ekonomi, baik yang sifatnya internal di daerah yang bersangkutan, maupun dalam kaitannya dengan interaksi antardaerah.

Pertumbuhan PDRB disuatu daerah harus juga mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini merupakan fokus utama dari pemekaran suatu daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asumsinya dengan adanya pemekaran maka kesejahteraan masyarakat akan

---

[47] Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2004

meningkat. Apabila dilihat dari tingkat pendapatan perkapita masyarakat di kabupaten setelah pemekaran menunjukkan kecenderungan meningkat.[48]

Seperti hasil wawancara dengan Yunus selaku pegawai di sekretariat daerah mengatakan bahwa,

> "Setelah pemekaran pada tahun 2002 kabupaten Gayo Lues dari Aceh Tenggara, perekonomian masyarakat Kabupaten Gayo Lues telah banyak meningkatkat dapat terlihat dari beberapa aspek infrastruktur maupun non infrastruktur dan juga bisa dilihat dari hasil pertanian."

Namun hasil wawancara dengan M.Noh mengatakan bahwa,

> "Pada saat ini perekonomian masyarakat kabupaten Gayo Lues menurun diakibatkan turunnya produktiviyas dan luas panen beberapa komuditi dari sektor pertanian dan juga berhenti nya aktifitas-aktivitas eksplorasi pertambangan mineral baik emas maupun timah."

Dari hasil penelitian Perekonomian Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2018 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya dan juga dapat di lihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2018 menurun dari pendapatan pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik berikut,

Grafik 4.1 PAD Kabupaten Gayo Lues 2014-2018

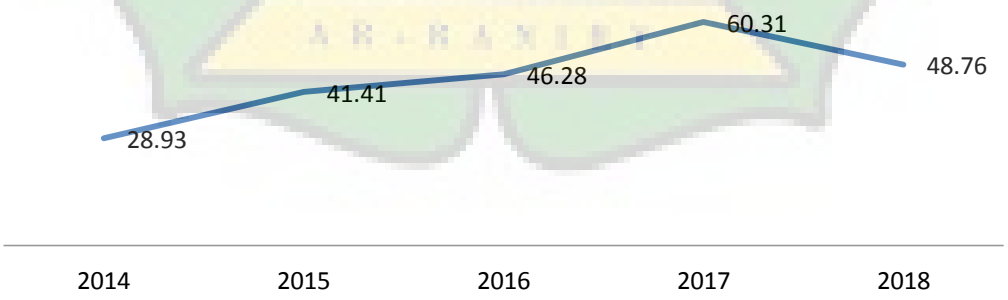

Sumber: BPS Gayo Lues 2018

[48] Asosiasi Ilmu Pemerintahan ,perguruan tinggi Muhammadiyah prosiding seminar nasional menyongsong pemilu 2014:*Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Politik Indonesia* berkemajuan. Makassar,21 juni 2013

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 19,49%. Sedangkan secara keseluruhan kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Kategori pertambangan dan penggalian yang mencatat penurunan (pertumbuhan negatif).

Hasil evaluasi pemekaran wilayah Gayo Lues menunjukkan bahwa dari aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi. Diketahui bahwa setelah pemekaran Gayo Lues telah melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian, namun karena masa transisi membutukan proses maka belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan.

Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahtraan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues belum dapat mengejar ketertinggalan meskipun kesejahteraan telah relatif sama dengan daerah-daerah kabupaten lainnya. Hal ini terlihat pada tabel berikut,

Tabel 4.4 Persentase Kemiskinan Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh 2018

No.	Kabupaten/ Kota	Persentase
1	Simeulue	19.78
2	Aceh Singkil	21.25
3	Aceh Selatan	14.01
4	Aceh Tenggara	14.29
5	Aceh Timur	14.49
6	Aceh Tengah	15.58
7	Aceh Barat	19.31
8	Aceh Besar	14.47
9	Pidie	20.47
10	Bireuen	14.31
11	Aceh Utara	18.27
12	Aceh Barat Daya	17.10

13	Gayo Lues	20.70
14	Aceh Tamiang	14.21
15	Nagan Raya	18.97
16	Aceh Jaya	14.16
17	Bener Meriah	20.13
18	Pidie Jaya	20.17
19	Banda Aceh	7.25
20	Sabang	16.31
21	Langsa	10.79
22	Lhokseumawe	11.81
23	Subulussalam	18.51
Aceh		**15,97**

Sumber: BPS Gayo Lues 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Gayo Lues menempati posisi kedua di tingkat kemiskinan dari Provinsi Aceh. Dari sisi ekonomi ketertinggalan Gayo Lues terhadap daerah lainnya disebabkan keterbatasan sarana-prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung bergeraknya perekonomian melalui investasi publik.

Begitu juga hasil wawancara dengan M. Isnan Amin selaku pegawai di kantor Dinas sosial pengatakan bahwa,

> "Tingginya angka kemiskinan di kabupaten Gayo Lues dikarenakan anak yang sekolah di luar daerah dan penyebabkan rupiah berkurang di kabupaten Gayo Lues untuk biaya anaknya di luar daerah." [49]

Wawancara dengan M.Insan mengatakan bahwa,

> "Pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat di kabupaten Gayo Lues berjalan kurang maksimal dikarenakan kurangnya data yang valid dari pemerintah desa seperti contoh nya pemberian bantuan fakir miskin belum merata dikarenakan pemerintah desa tidak mendata dengan benar masih menggunakan spoil sistem."[50]

[49] *Wawancara 10 Agustus 2019*
[50] *Wawancara 12 Agustus 2019*

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat di kabupaten Gayo Lues secara menyeluruh sudah membaik namun masih perlu nya pengawasan dari atasan sehingga perekonomian tersebut dapat di tingkatkan seperti sebelumnya, pemerintah daerah harus berperan langsung dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

3. Potensi Alam Daerah

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh tenggara pada tahun 2002. Daerah ini dikelilingi oleh bukit bukit yang indah yang ditumbuhi dengan pohon pinus sehingga kabupaten ini dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Bukit, walaupun berada di wilayah perbukitan dan terpencil, kabupaten ini diam-diam ternyata memiliki kekayaan yang melimpah, pesona alam indah, serta memiliki berbagai macam satwa, sehingga pantas apabila kawasan ini perlu perhatian lebih mendalam dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat[51].

Sektor pertanian merupakan sektor andalan kabupaten Gayo Lues , sektor ini merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gayo Lues. Sektor pertanian ini didukung oleh faktor iklim dan geomorfologis wilayah Gayo Lues yang berada pada daerah dataran tinggi dengan tanahnya yang subur, yang sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian, baik untuk tanaman pangan, hortikultural maupun tanaman perkebunan[52].

Di Gayo Lues terdapat potensi wisata alam yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Contohnya seperti pendakian ke Gunung Leuser,

---

[51] *http://www.insetgalus.com/berita?id=Gayo_Lues_Miliki_Pesona_Wisata_Indah_Dan_Kaya_Sumber_Alam diakses tanggal 12 oktober 2019*

[52] *Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues*

wisata sungai, treking hutan, taman anggrek, dan lainnya. Desa Agusen di Gayo Lues, misalnya telah ditetapkan sebagai kampung wisata. Di sini ada wisata hutan, sungai, bahkan bisa dilihat langsung aktivitas masyarakat menanam padi di sawah atau memetik kopi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Said Muhammad menyebutkan bahwa,

> "Gayo Lues memiliki potensi alam yang begitu banyak sumberdaya alam yang terbaharui dan sumberdaya yang tidak terbaharui seperti emas dan timah. Dengan pengelolaan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini membutuhkan peranan dari pemerintah."[53]

Sesuai seperti yang disebutkan di atas diharapkan dengan adanya potensi daerah yang dapat membatu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ini perlu dukungan dari pihak terkait. Pihak terkait yang dimaksud seperti pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak pada lingkungan.

Dari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah Gayo Lues mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, identitas masyarakat Gayo Lues yang mempunyai sejarah yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat.

---

[53] *Wawancara Tanggal 12 Agustus 2019*

Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, juga sering berimplikasi pada ketegangan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

4.3 Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gayo Lues

Kesejahteraan adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Suatu keadaan sejahtera tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan kebutuhan dipenuhi, dan ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, dan bahkan seluruh anggota dalam masyarakat.

Masyarakat yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Gayo Lues berhak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Sesuai dengan fungsi dan kewajiban dari aparatur pemerintah adalah membantu masyarakat.

Peran pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang peneliti ukur dalam 3 aspek. Aspek yang diperhatikan adalah tingkat pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan perekonomian, serta mengelola potensi alam. Berikut uraian dari tiap indikator,

1. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tingkat pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah masih belum memadai. Padahal tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah, walau tidak bertujuan untuk mencari keuntungan namun tidaklah harus mengabaikan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui aparat pemerintah tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan, dan kebutuhan masyarakat.

Namun hal ini tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Dimana para aparat pemerintah sebagian besar tidak disiplin, memperlambat pengurusan surat-menyurat, dan juga ada aparat yang tidak bisa menggunakan komputer. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang tidak memadai membuat pelayanan kepada masyarakat tidak sesuai dengan tujuan.

Hasil wawancara dengan Ismadi mengatakan bahwa,

> "Banyak sekali upaya upaya aparut pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya yaitu mengadakan pelatihan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar dapat berkomunikasi secara baik dan kompeten dalam bidangnya ketika melayani masyarakat masyarakat yang kecil."[54]

Sama halnya yang dikatakan oleh Sukri yaitu,

> "Banyak upaya dari pemerintah dalam memenuhi dan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam tingkat pelayanan yang diberikan seperti dengan memberikan sarana dan prasarana yang baik kepada masyarakat yaitu seperti ruang tunggu yang nyaman."[55]

---

[54] *Wawancara tanggal 15 Agustus*
[55] *Wawancara tanggal 15 Agustus*

Pelayanan publik kepada masyarakat yang baik dapat menunjukkan tingkat kepuasan dari masyarakat. Tingkat kepuasan ini dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di bidang pelayanan publik.

2. Mempercepat Pembangunan Perekonomian

Pembangunan perekonomian daerah yang dimaksud adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Seperti hasil wawancara dengan Yunus mengatakan bahwa,

> "Pemerintah telah banyak melakukan cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten Gayo Lues diantaranya memberikan bantuan bantuan kepada fakir miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun dalam hal ini dikarenakan masyarakat itu sendiri tidak menggunakan untuk kebutuhan sendiri seperti hal nya pemerintah memberikan bantuan seperti bibit untuk para petani namun masyarakat tidak seutuhnya mengelola hal tersebut akan tetapi mereka menjualnya."[56]

Pemerintah kabupaten Gayo Lues sudah menunjukkan perannya dalam bidang ini. Perekonomian masyarakat Gayo Lues sebagian besar pada bidang pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Pemerintah berusaha agar hasil dari komoditi pada bidang-bidang tersebut dapat dijual ke luar daerah. Salah satu langkah pemerintah adalah dengan membuat jalur-jalur yang dapat dengan cepat menuju daerah lain sehingga biaya pengiriman yang murah.

Selain daripada yang tersebut di atas, dari wawancara dengan M. Isnan Amin mengatakan bahwa,

---

[56] *Wawancara tanggal 26 Juli 2019*

> "pemerintah Gayo Lues berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan bantuan-bantuan, bantuan yang diberikan berupa pembangunan infrastruktur desa secara merata hingga daerah terpencil dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal agar masyarakat sejahtera".[57]

Grafik 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan (persen) di Kabupaten Gayo Lues 2018

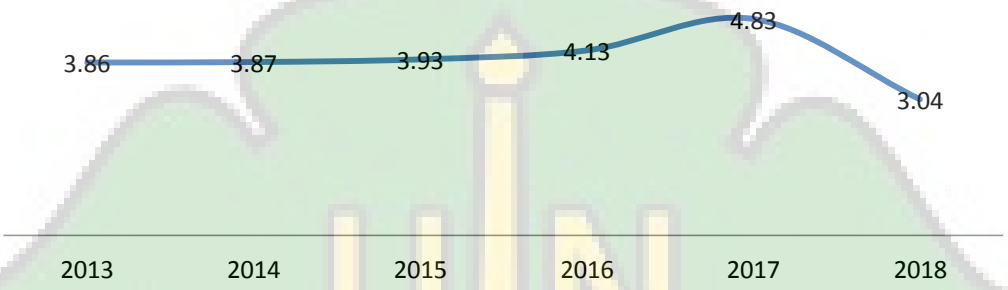

Sumber: BPS Gayo Lues 2018

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Gayo Lues tahun 2018 mencapai 3,04 persen, sedangkan tahun 2017 sebesar 4,83 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 19,49 persen. Sedangkan secara keseluruhan kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Kategori pertambangan dan penggalian yang mencatat penurunan (pertumbuhan negatif).

Penurunan pertumbuhan ekonomi kategori pertambangan dipicu oleh berhentinya seluruh aktifitas eksplorasi pertambangan mineral (baik emas ataupun timah) di Kabupaten Gayo Lues yang disebabkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan perijinan aktifitas pertambangan harus melalui kementerian ESDM yang dimulai sejak tahun 2016.

---

[57] *Wawancara di Dinas Sosial 12 Agustus 2019*

Sedangkan penurunan pertumbuhan kategori pertanian disebabkan oleh penurunan produktivitas dan luas panen beberapa komoditi di tanaman pangan dan hortikulturan yang dimana penurunan lebih besar dibanding pertumbuhan di perkebunan. Peternakan, perikanan ataupun kehutanan. Penurunan ini tidak terlalu berdampak kepada kategori lain karena komoditi-komoditi ini dijual ke luar Kabupaten Gayo Lues dalam keadaan masih berupa barang mentah.

Pemerintah Gayo Lues telah mengupayakan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berupa bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang maupun bibit pertanian dan perkebunan. Terlihat pada Grafik 4.3 bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues mengalami penurunan.

Grafik 4.3 Tingkat kemiskinan Kabupaten Gayo Lues 2014-2018

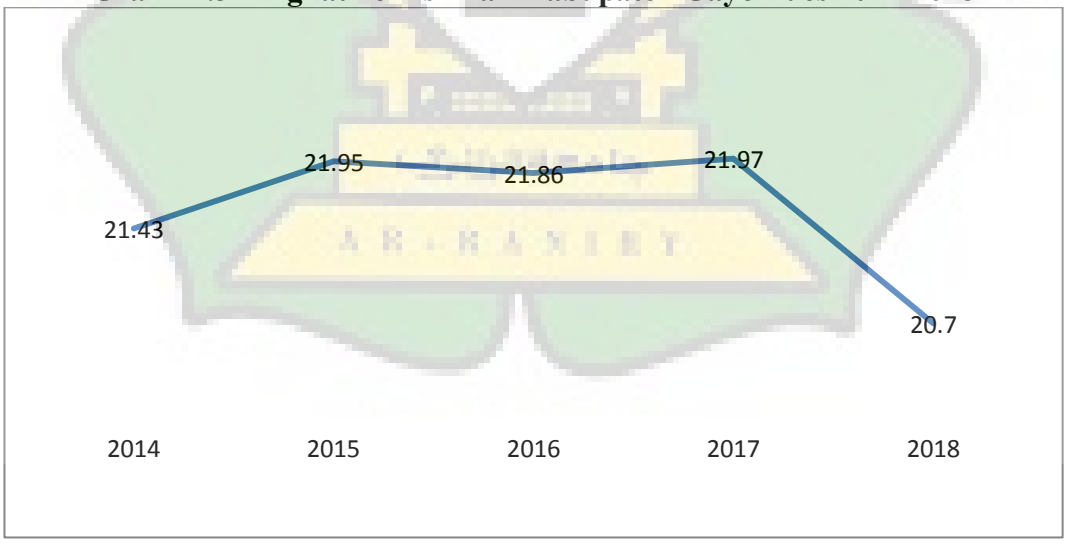

Sumber: BPS Gayo Lues 2018

Berdasarkan grafik di atas, terlihat wujud dari peran pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Gayo Lues. Dimana pada tahun 2017

mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 0,11%. Namun pada tahun 2018 ini pemerintah berhasil menurunkan sebesar 1,27%. Walaupun perekonomian Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2018 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya.

3. Mengelola Potensi Alam

Gayo Lues memiliki potensi alam yang berupa sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang dimiliki dapat diolah menjadi lahan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, serta dapat dijadikan sebagai objek pariwisata. Dengan potensi alam yang melimpah ini selain dari masyarakat yang mengolah juga dibutuhkan peranan dari pemerintah.

Sektor pertanian merupakan sektor andalan kabupaten Gayo Lues , sektor ini merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gayo Lues.

Tabel 4.5 Luas Lahan Sawah, Kebun dan Ladang Gayo Lues 2018

No.	Kecamatan	Sawah (Ha)	Kebun (Ha)	Ladang (Ha)
1	Kuta Panjang	1122	300	150
2	Blang jerangon	1305	91	904
3	Blangkejeren	1353	400	100
4	Putri Betung	331	347	50
5	Dabun Gelang	627	580	500
6	Blang Pegayon	546	350	250
7	Pining	196	1107	750
8	Rikit Gaib	750	328	1070
9	Pantan Cuaca	425	732	984
10	Terangun	676	2240	825
11	Tripe Jaya	415	385	606
Jumlah		7746	6860	6189

Sumber: BPS Gayo Lues 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki luas lahan sawah terluas adalah Kecamatan Blangkejeren dengan luas 1.353 hektar. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah sawah terkecil adalah Kecamatan Pining dengan luas 196 hektar. Untuk lahan kebun yang terluas terdapat di daerah Kecamatan Terangun dengan luas 2.240 hektar. Sedangkan kecamatan dengan lahan kebun terkecil adalah Kecamatan Blangjerangon dengan luas 91 hektar. Untuk lahan lading yang terluas terdapat di daerah Kecamatan Rikit Gaib dengan luas 1.070 hektar. Sedangkan luas ladang yang terkecil berada di Kecamatan Putri Betung dengan luas 50 hektar.

Dengan adanya potensi alam Gayo Lues berupa lahan sawah, ladang, dan juga kebun dibutuhkan adanya dukungan dari pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi alam adalah dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung kegiatan masyarakat, sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan M. Isnan Amin dikatakan bahwa,

> "dari sisi pemerintah sering melakukan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola potensi alam sesuai dengan keunggulan geostrategis. Melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia efisiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya disini kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya."[58]

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa potensi alam Gayo Lues yang dapat dikembangkan seluas-luas nya untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Adapun wawancara peneliti dengan Suardi menyebutkan bahwa,

---

[58] *Wawancara tanggal 12 Agustus 2019*

> "pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terpencil tidak mudah dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan juga waktu, serta sumberdaya manusia yang belum memadai. Namun pemerintah tetap memberikan kesempatan yang sama dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mengelola lingkungan sekitar dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian agar masyarakat dapat hidup sejahtera."[59]

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah tetap mengusahakan masyarakat memperoleh haknya yang sama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah yaitu dengan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keadaan alam yang baik.

Keadaan alam Gayo Lues yang dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga masyarakat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengelola potensi alam ini. Salah satu bentuk dari mengelola potensi alam adalah dengan dijadikan sebagai objek wisata. Seperti terlihat pada Tabel 4.6 berikut,

Tabel 4.6 Objek Wisata Di Kabupaten Gayo Lues 2016-2018

No.	Objek Wisata	Lokasi
1	Raint Forest Rodge Kedah	Kecamatan Blang Jerango
2	Masjid Asal Peparik	Kecamatan Blang Jerango
3	Kolam Biru Rerebe	Kecamatan Tripe Jaya
4	Tanggak Kaming	Kecamatan Terangun
5	Air Terjun Pantan Cuaca	Kecamatan Pantan Cuaca
6	Kolam Pemandian Penomon	Kecamatan Rikit Gaib
7	Air Terjun Penomon	Kecamatan Rikit Gaib
8	Air Terjun Paya Kumer	Kecamatan Tripe Jaya
9	Wisata Kebun Nanas	Kecamatan Blang Jerango
10	Kolam Pancing	Kecamatan Rikit Gaib
11	Air Terjun Akang Siwah	Kecamatan Blangpegayon
12	Air Kala Pinang	Kecamatan Blangkejeren
13	Air Terjun Lesten	Kecamatan Pining
14	Air Panas Kala Seuem	Kecamatan Pining
15	Air Terjun Ramung	Kecamatan Putri Betung
16	Wisata Kebun Kopi Pantan Cuaca	Kecamatan Pantan Cuaca
17	Air Terjun Lesten	Kecamatan Pantan Cuaca
18	Kampong Wisata Rerebe	Kecamatan Tripe Jaya

[59] *Wawancara tanggal 15 Agustus 2019*

19	Perawang Lopah	Kecamatan Blangjerango
20	Blang Tasik	Kecamatan Blangjerango
21	Goh Lemu	Kecamatan Pining
22	Air Terjun Wer-Wer	Kecamatan Dabun Gelang
23	Makam Pahlawan	Kecamatan Dabun Gelang
24	Gunung Angrek	Kecamatan Putri Betung
25	Puncak Lestari Ayu	Kecamatan Blangjerango
26	Wisma Kedah	Kecamatan Blangjerango

Sumber: Data Base Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues 2018

Pemerintah juga membangun jalur-jalur untuk memudahkan alat transportasi masyarakat untuk membawa hasil dari pertanian. Pemerintah telah mengupayakan pengadaan jalan agar masyarakat bisa menikmatinya. Pembangunan jalan ini guna salah satu upaya pengelolaan potensi yang ada di daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga memudahkan wisatawan untuk mengunjungi daerah-daerah wisata.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues adalah dapat di lihat dari segi pelayanan publik, dimana masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan akses dari pelayanan berupa pelayanan administrasi, pendidikan, dan juga kesehatan dimana sebelum pemekaran hanya harus dilakukan di kabupaten Aceh Tenggara yang sekarang bisa dilakukan di setiap daerah-daerah. Dari segi pembangunan ekonomi, kesejahteraan ekonomi masyarakat belum merata, masih ada daerah yang tergolong desa tertinggal dan juga dapat di lihat bahwa kemiskinan di kabupaten tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari segi potensi alam, Gayo Lues memiliki potensi yang yang melimpah seperti dari sektor pertanian,sektor, pariwisata, dan sektor-sektor yang lainnya, semua itu bisa di kelola langsung pemerintah dan juga masyarakat Gayo Lues karena mendapatkan pengakuan menjadi daerah otonom.
2. Peran pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi pelayanan publik kepada masyarakat perlu kualitas sumberdaya dari aparat pemerintah ditingkatkan dalam melayani publik. Dari segi pembangunan perekonomian dibutuhkan perhatian lebih besar di daerah

yang tertinggal agar kesejahteraan tidak terpusat pada daerah ibukota. Serta dari segi pengelolaan potensi alam dibutuhkan kebijakan untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang bisa dijadikan masukan pelaksanaan pemekaran daerah kedepannya:

1. Meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian membaik serta pengelolaan potensi lokal dengan sebaik-baiknya sebagai dampak pemekaran wilayah Gayo Lues menjadi daerah yang lebih sejahtera.Aparat pemerintah tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan, dan kebutuhan masyarakat.
2. Diharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata agar masyarakat sejahtera. Mengembangkan potensi alam yang ada dengan tidak merusak lingkungan sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gayo Lues.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta. PT. Rineka Cipta

Badan Pusat Statistik Tahun. 2001, Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia, Jakarta : BPS Pusat.

Bappenas, & UNDP. 2008. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 . Jakarta: BRIDGE.

BPS Provinsi Aceh bekerja sama dengan BAPPEDA Aceh. 2014. Aceh dalam Angka (Aceh in Figures) 2013. BandaAceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Burhan bungin.1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada

Ermaya Suradinata. 2000. Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Untuk Meningkatkan Interrasi Bangsa. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan

Frans M. parera, dkk. 2000. Demokrasi dan Otonomi, Mencegah Disintegrasi Bangsa. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Hikmat,Mahi M. 2011. Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. Yogyakarta: Graha Ilmu

Husein umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesisi Bisnis. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada

Jurnal Ilmiah mahasiswa (JIM) Ekonomi pembangunan fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol. 1 No. 2 November 2016 : 389-399.

Kaloh. J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kuncoro Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.

Miftachul Huda. 2009. Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Paskarina, Caroline dan Mariana, Dede. 2008. Demokrasi dan Politik Desentralisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu

Ratnawati, Tri. 2009, Pemekaran Daerah : Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset

Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Suwandi. 2015. Desentralisasi Fisikal dan dampaknya pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, kemiskinan, dan kesejahteraan di Kabupaten/kota induk Provinsi papua. Yogyakarta: CV Budi Utama

Vera wullur, 2009, Mengoptimalkan Kepedulian Sosial Masyarakat. Jakarta: PT grasindo

Warpani, Suwardjoko. 1980. Analisis Kota dan Daerah. Bandung: ITB

Jurnal

Abdul Hakim, *analisis dampak Pemekaran daerah ditinjau dari aspek Percepatan pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan public, (pekan baru Fakultas of Ekonomics Riau University*,JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 Februari 2017)

Emie Yuliati 2011.Evaluasi Hasil Pemekaran (studi kasus pemekaran kabupaten), Tesis Jakarta Universitas Indonesia

Hasriani, studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan masyarakat di Desa Tafagapi Kecamatan Menui kepulauan Kabupaten Morowali, jurusan Ekonomi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas halu Oleo Kendari (2016).

Lestiawati,"pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (studi kasus Pekon Lintik kecamatan Krui selatan, Kabupaten Pesisir Barat), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas islam Negeri raden Intan Lampung, 2018,

Lifia Anis Tahara Andi Lantara, pengaruh Pemekarana Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dna Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara,fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassara (2016)

Pelita volume 3, nomor 2 http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274

Rita helbra Tenrini pemekaran daerah kebutuhan atau euphoria Demokrasi? Mengapa harus mekar pusat kebijakan APBN BKF

Sella Ayu Wandira Harahap, "*DAMPAK PEMEKARAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR (Studi Kasus Pada Desa*

Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)", Vol 7 No 1 April 2014 ISSN : 2085 – 0328

Yayan Amroni. 2019.Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi

Ade Cahyat, Christian Gönner, Michaela Haug ,Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga, Center for International Forestry Research Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor,

Asosiasi Ilmu Pemerintahan ,perguruan tinggi Muhammadiyah prosiding seminar nasional menyongsong pemilu 2014:Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Politik Indonesia berkemajuan. Makassar,21 juni 2013

Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues 2018

BPS Gayo Lues 2018

Dinas Kesehatan Kabupaten gayo Lues 2018

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

UU No 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan

PP No. 39 Tahun 2006

PP No. 129 Tahun 2000 BAB 2 Pasal 2

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Artikel

http://lintasgayo.co/2017/08/08/ini-kabupaten-termiskin-di-aceh-versi-ideas

http://www.insetgalus.com/berita?id=Gayo_Lues_Miliki_Pesona_Wisata_Indah_Dan_Kaya_Sumber_Alam

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 88/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahn Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. — Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. — Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
Nama : Zarrah
NIM : 150802003
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.

KEDUA : Pembayaran honoradium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Januari 2019
An. Rektor
Dekan,

Ernaldi Dewi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dinakluni dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1496/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2019 16 Juli 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

_____

di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Zarrah
NIM : 150802003
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejateraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues
Lokasi Penelitian : Kantor Bupati Kabupaten Gayo Lues (Biro Pemerintahan dan Ekonomi) 3 kecamatan Kab, Gayo Lues dan Dinas Sosial Kab. Gayo Lues, BPS Kab. Gayo Lues.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

Ermita Dewi

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS SOSIAL
Jln. Tgk. H. Machmoed No.04 Blangkejeren Kode Pos 24653
Telepon/Faksimile. 0642 – 21774 *dinsosgayolues11@gmail.com*

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **SUKRI, SP.MM**
Nip	: 19701111 199003 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Tk.I / IV. b
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues
Instansi	: DINAS SOSIAL

2. Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas :

Nama	: **ZARRAH**
NIM	: 150802003
Fakultas/prodi	: FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Ilmu Administrasi Negara
Judul	: Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues
Lokasi Penelitian	: Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues

Telah selesai melakukan Penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juli 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang Berjudul: **" EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GAYO LUES"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlumya.

Blangkejeren, 09 Agustus 2019
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Gayo Lues

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS SOSIAL

SUKRI, SP.MM
Pembina Tk. I / IV. B
Nip. 19701111 199003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
Jl. Nasional Blangkejeren-Kutacane, Kampung Cempa Kode Pos 24653
Email : kecamatanblangkejeren01@gmail.com

Blangkejeren, 15 Agustus 2019 M
13 Dzulhijjah 1440 H

Nomor : 140/1637/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Telah Selesai Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

1. Berkaitan dengan surat Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-1496/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2019 Tanggal 16 Juli 2019, perihal Permohonan Izin Penelitian di Kecamatan Blangkejeren;
2. Dengan ini kami sampaikan benar nama tersebut dibawah ini :

   Nama : **ZARRAH**
   NIM : 150802003
   Semester : VIII (Delapan)
   Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi
   Alamat : Kampung Kutelintang
   Judul : **EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GAYO LUES.**
3. Telah selesai melaksanakan Penelitian pengumpulan data di Kecamatan Blangkejeren selama 6 (enam) hari, untuk bahan Penulisan Skripsi;
4. Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

CAMAT BLANGKEJEREN

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES KECAMATAN BLANGKEJEREN

ENA MAIRKHSALEH, SSTP, MSP
NIP. 19850127 200312 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Tgk. H. Machmoed No. 02 Telp.(0624) 21629 *Fax* (0642) 2340034
BLANGKEJEREN – Kode Pos 24653

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **LAILANI BERUTU, SE**
NIP	: 19850622 200604 2 001
Pangkat/ Gol. Ruang	: Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan	: Kepala Sub Pemerintahan Umum dan Pertanahan Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues
Tempat Tugas	: Bagian Tata Pemerintahan
Instansi	: Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues

2. Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi yang beridentitas :

Nama	: **ZARRAH**
NIM	: 150802003
Fakultas/Prodi	: FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Ilmu Administrasi Negara
Judul	: Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues
Lokasi Penelitian	: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Gayo Lues

Telah selesai melakukan penelitian pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Gayo Lues, Tanggal 26 Juli 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi, Penelitian yang berjudul : **"EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GAYO LUES".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Blangkejeren, 26 Juli 2019
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDAKAB GAYO LUES

LAILANI BERUTU, SE
Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 19850622 200604 2 001
N.D Nomor Peg 875.1/290/N.D/2019
Tanggal 29 Juli 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN PINING
Jl.Ladia GalaskanPinding-lokop serbajadi kode pos 24653

Nomor : 154.
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : telah selesai melaksanakan penelitian

Kepada Tth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry

1. Berkaitan surat Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh No B-1496/Un.08/FISIP/pp.009/07.2019 Tanggal 15 Agustus 2019, prihal permohonana izin penelitian di kecamatan Pining;

2. Dengan ini kami sampaikan benar nama tersebut di bawah ini

Nama	: Zarrah
Nim	: 150802003
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Alamat	: kmpung Kutelintang
Judul	: EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GAYO LUES

3. Telah selesai melaksanakan penelitian pengumpulan data di kecamatan Pining pada tanggal 15 Agustus untuk bahan penulisan skripsi;

4. Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

CAMAT PINING

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES KECAMATAN PINING

SHAIFULLAH S.Pd
Penata III /c
Nip . 197203241993051001